

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat penting dicapai karena setiap negara menginginkan adanya perubahan yang lebih baik. Dewasa ini teknologi merupakan kebutuhan sehari-hari dalam berbagai aktivitas, baik dalam pendidikan, transportasi, kesehatan, bisnis, dan juga pemerintahan. Teknologi ini sangat dibutuhkan untuk membantu suatu organisasi ataupun suatu instansi Seperti yang dilakukan Pada instansi pemerintah. Pemerintahan telah terbantu oleh teknologi dalam melakukan aktivitas, baik dalam penyusunan, pemrosesan, maupun pelaporan keuangan. Dalam hal pelaporan keuangan teknologi dapat sangat membantu pemerintah untuk menginput dan menyusun transaksi keuangan misalnya seperti transaksi penerimaan kas maupun pengeluaran kas yang terintegrasi dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. SAPD diatur didalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berisikan Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah, Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 ini juga dijelaskan bagaimana pengelolaan kas di pemerintah termasuk pengelolaan dana perimbangan.

Sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi setiap Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat. Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Deddi Nordiawan, 'et. al. (2018:266) SAPD memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yaitu

a) Basis Akuntansi

SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening Kas Daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

b) Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem Pembukuan berpasangan (*double entry system*) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu $Aset = Utang + Ekuitas Dana$. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain.

SAPD sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas.

Seperti halnya SAPP, SAPD juga terdiri atas dua subsistem, yaitu:

1. **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemda, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang. Dalam pembahasan buku ini, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah akan disebut dengan istilah Sistem Akuntansi PPKD.
2. **Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah**
Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD.

Dalam Konstruksi keuangan negara, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu SKPD dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam pelaksanaan anggaran, transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu

1. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja.
2. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemda.
Dengan demikian, SKPKD akan menjalankan sistem akuntansi SKPD dan juga Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SKPD)¹.

Dalam Penerimaan dan pengeluaran kas diperlukan adanya prosedur yang baik yang nantinya akan sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik prosedur penerimaan dan pengeluaran kas akan semakin dapat dipercaya besarnya kas pada laporan keuangan tersebut. Untuk itu maka diperlukan suatu program atau software yang dapat membantu pemerintah kota medan. Saat ini ada program atau software yang disediakan pemerintah untuk dapat membantu pemerintah kota medan. Namanya adalah Simda yang merupakan software yang disediakan pemerintah untuk

¹ Deddi Nordiawan, 'et. al, **Akuntansi Pemerintah**, Salemba empat, Jakarta, 226

membantu pemerintahan kota maupun daerah untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Program aplikasi simda ini dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi). Adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada Pemda terutama dalam penyusunan APBD. Aplikasi Simda ini memiliki Keunggulan serta manfaat dalam penggunaannya 1. Sesuai peraturan perundang-undangan, 2. Terintegrasi, dan 3. Mudah digunakan. Tetapi saat ini terjadi permasalahan pada pemerintahan kota medan yaitu ketidakcocokan data baik penerimaan maupun kesalahan pada pengentrian data pada pengeluaran kas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada ‘Pemerintah Kota Medan.**

1.2 Perumusan Masalah

Menurut Jadongan Sijabat (2014:37);

Rumusan masalah penelitian harus jelas dan tidak ambiguitas. Masalah penelitian sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas hubungan antara dua yang mengekspresikan secara jelas hubungan antara dua atau lebih variabel.²

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian maka masalah yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu :

²Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, 2014, Hal. 37.

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan Kas pada pemerintah Kota Medan ?
2. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaranKas pada pemerintah Kota Medan ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian terfokus pada apa yang diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah ;Bagaimana penerapan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada Pemerintah Kota Medan yang mencakup prosedur, fungsi, dan dokumen. Penelitian ini mengambil data dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan yaitu Penerimaan kas yang bersumber dari pajak dan pengeluaran kas yang bersumber dari pengeluaran gaji pns, kegiatan keagamaan, dan juga bantuan sosial sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui prosedur, fungsi, dan dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Pemerintah Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana prosedur, fungsi,dan dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Pemerintah Kota Medan.
2. Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi Pemerintah Kota Medan dalam peningkatan sistem informasi keuangan.
3. Sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan dan penulis lain yang akan mengadakan penelitian dengan judul yang sama.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga merupakan kesatuan bagian bagian yang saling berhubungan yang berada dalam satu organisasi wilayah, serta memiliki penggerak penggerak yang saling berkesinambungan atau terhubung.

Menurut George dan William (2006):

Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi kemudian informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan³.

Menurut Jogianto (2005):

sistem adalah kumpulan dari elemen elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertent. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian kejadian dan kesatuan yang nyata seperti tempat, benda dan orang orang⁴

sedangkan menurut Indrajit (2001), sistem adalah kumpulan kumpulan dari komponen komponen yang memiliki unsure keterkaitan antara satu dengan yang lainnya⁵. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem

³George dan William, **Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Atas Pendapatan Di Rumah Sakit Hermana-Lembean**, Jurnal EMBA Vol 3No 4 Desember 2015

⁴ Arifaskah, **Pengertian Sistem dan Contohnya (Softskill)**, Arifaskah.wordpress.com

⁵ Ibid, Hal 2

merupakan sekelompok komponen dan elemen yang saling berhubungan satu sama lain dalam satu organisasi dan secara keseluruhan saling melengkapi.

2.1.2 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung berjalannya operasional satu organisasi. Sistem informasi juga merupakan satu sistem penyedia informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan.

Menurut John F. Nash dalam Kompasiana (2013):

Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai internet dan ekstern dan menyediakan data sebagai dasar pengambilan keputusan⁶.

Sedangkan menurut Henry Lucas dalam Kompasiana (2013) sistem informasi adalah satu kegiatan dari prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia dan alat seperti teknologi yang bermaksud untuk menata jaringan komunikasi satu kegiatan dari prosedur yang diorganisasikan.

⁶ Kompasiana, **Pengertian SI (Sistem Informasi)**, Kompasiana.com, 2013

2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis computer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi.

Menurut mulyadi (2001),

sistem informasi akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa sebagai upaya untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan oleh tim manajemen dalam upaya pengelolaan dan pengambilan keputusan⁷.

Menurut Wilkinson (2000) sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang mencakup semua fungsi dan aktifitas akuntansi dan memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan pada sumber daya ekonomi dari kejadian eksternal maupun internal organisasi⁸.

2.1.4 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi (SIA) memiliki beberapa unsure yang perlu dipenuhi. Hal tersebut berguna untuk mengikat satu informasi dengan informasi lainnya yang dilakukas atau diorganisasikan. Unsure unsure yang terdapat dalam satu sistem akuntansi saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga dapat dilakukan pengolahan data mulai dari awal transaksi hingga pelaporan akuntansi. Unsure unsure tersebut mencakup formulir, buku besar, jurnal dan sebagainya.

⁷ Pengertiandefenisi, **Pengertian Sistem Informasi**, Pengertiandefenisi.com, 2012

⁸ MateriDosen.cpm, **Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**, MateriDosen.com, 2017

Menurut Mulyadi (2008:3-5) unsur unsur sistem informasi akuntansi yaitu:

1. Formulir

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas.

2. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam jurnal ini, data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

3. Buku Besar

Buku Besar (*general ledger*) terdiri dari rekening-rekening pembantu yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

4. Buku Pembantu

Buku Pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang terinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku Besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir (*book of final entry*), yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu.

5. Laporan

Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya.

⁹Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Salemba Empat, Jakarta 2008, Hal. 5.

2.1.5 Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi yang merupakan sebuah sistem dalam mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan tentu memiliki tujuan dan manfaat yang tidak berbeda dengan pengertiannya.

Menurut Diana dan Setiawati (2011:5) tujuan dan manfaat sistem informasi akuntansi yaitu:

- 1. Mengamankan harta/kekayaan perusahaan. Harta kekayaan yang dimaksud meliputi kas perusahaan, persediaan barang dagangan, termasuk asset tetap perusahaan.**
- 2. Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan.**
- 3. Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal.**
- 4. Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi.**
- 5. Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit (pemeriksaan).**
- 6. Menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan.**
- 7. Menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian¹⁰.**

2.2 Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pemerintah

2.2.1 Sistem Informasi Penerimaan Kas Pemerintah

Sistem informasi penerimaan kas merupakan sistem kas yang diterima satu organisasi baik swasta maupun pemerintah, baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas.

¹⁰Diana dan Setiawati, **Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Pada TOKO CAMPLADEAN MANADO**, jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1)), 2017

Menurut Sujarweni (2016) sistem informasi penerimaan kas adalah satu prosedur catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang yang berasal dari berbagai macam sumber. Sedangkan menurut Mulyadi (2016) sistem penerimaan kas adalah kas yang diterima baik yang berupa uang tunai maupun surat berharga¹¹.

Menurut Deddi Nordiawan, 'et. al. (2018:1)

Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan¹².

Menurut Pemerintahan ada 2 Jenis Penerimaan, yaitu:

1. Penerimaan Kas Menurut Pemerintahan Pusat

- a) Penerimaan Perpajakan, yaitu semua penerimaan yang terdiri atas pajak yang berasal dari dalam negeri dan pajak internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari semua penerimaan Negara yang merupakan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai serta pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar.
- b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu semua penerimaan yang diterima dalam bentuk penerimaan sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

¹¹ Mulyadi, **Sistem Informasi Akuntansi**, Salemba Empat, Jakarta, 2016, Hal 379

¹² Deddi Nordiawan 'et. al. **Akuntansi Pemerintahan**, 2018, Hal. 1

penerimaan bukan pajak lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

- c) Penerimaan Hibah, yaitu semua penerimaan negara yang baik itu dalam bentuk devisa, ataupun dalam bentuk barang dan jasa, serta surat berharga yang diperoleh dari pemberian Negara lain atau perorangan. Hibah tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat. Hibah termasuk salah satu penerimaan resmi Negara non pajak. Salah satu penerimaan non pajak ini adalah sumbangan.

2. Penerimaan Kas Menurut Pemerintah Daerah

- a) Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- b) Pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pendapatan transfer lainnya.
- c) Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam

melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah¹³.

Pada saat ini pemerintah sudah menggunakan program atau software untuk membantu pekerjaan pemerintah. Nama programnya ialah simda Simda yang merupakan software yang disediakan pemerintah untuk membantu pemerintahan kota maupun daerah untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Program aplikasi simda ini dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi). Adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada Pemda terutama dalam penyusunan APBD. Aplikasi Simda ini memiliki Keunggulan serta manfaat dalam penggunaannya 1. Sesuai peraturan perundang-undangan, 2. Terintegrasi, dan 3. Mudah digunakan.

2.2.1.1 Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK mencatat pendapatan SKPD dalam buku jurnal khusus pendapatan menggunakan dokumen sumber dari Bendahara Penerimaan berupa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Penerimaan dan lampirannya. Jurnal pendapatan SKPD adalah:

Dr. Kas di bendahara penerimaan

Rp XXXXXX

Cr. Pendapatan...

Rp XXXXX

¹³**Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah**, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol 2 No.1 2019 Hal. 30-45.

Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD kemudian disetor kepada rekening Kas Daerah (Kasda). PPK mencatat transaksi penyetoran tersebut dengan menjurnal:

Dr. RK PPKD	Rp XXXXX
Cr. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp XXXXX

Pada saat setoran pendapatan tersebut diterima di Rekening Kas Daerah, Sistem Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi penerimaan tersebut dengan menjurnal:

Dr. Kas di Kasda	Rp XXXXX
Cr. RK SKPD	Rp XXXX

2.2.1.2 Fungsi dan Pihak yang terkait

Fungsi yang terkait dalam penerimaan kas yaitu:

1. Kepala SKPD /Pengguna Anggaran

Dalam prosedur kegiatan ini, Kepala SKPD berfungsi/berwenang untuk:

- a. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- b. Menandatangani SPJ yang berasal dari PPKSKPD yang selanjutnya SPJ tersebut diserahkan kepada PPKD.

2. Bendahara Penerimaan

Dalam prosedur kegiatan ini, Bendahara Penerimaan berfungsi/berwenang untuk:

- a. Menerima sekaligus mencocokkan uang yang disetorkan oleh Wajib Pajak/Retribusi sesuai dengan yang tertera pada SKPD/SKRD.
- b. Membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP)/Bukti lain yang sah dan menyerahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi.
- c. Menyetorkan uang yang diterimanya setiap hari ke Bank beserta Surat Tanda Setoran (STS) yang telah dibuat.
- d. Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban untuk penerimaan satu bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada PPKD.

3. PPK-SKPD

Dalam prosedur kegiatan ini, PPK-SKPD berfungsi/berwenang untuk:

- a. Memverifikasi, mengevaluasi, dan mencocokkan Laporan Pertanggungjawaban yang berasal dari Bendahara Penerimaan. Apabila dinyatakan tidak cocok maka dikembalikan lagi kepada Bendahara Penerimaan.
- b. Menandatangani Laporan Pertanggungjawaban yang telah dinyatakan cocok.

4. PPKD

Dalam prosedur kegiatan ini, PPKD berfungsi/berwenang untuk:

- a. Membandingkan antara SPJ yang berasal dari Kepala SKPD dengan Nota Kredit dari Bank. Apabila tidak sesuai maka dikembalikan kepada Kepala SKPD.
- b. Membuat Surat Pengesahan SPJ yang kemudian disampaikan kepada PPK-SKPD.

2.2.1.3 Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan pada Sub Sistem Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan adalah:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Dokumen ini digunakan sebagai pedoman bagi wajib pajak/retribusi dalam menentukan jumlah rupiah yang wajib disetor kepada Bendahara Penerimaan.

2. Tanda Bukti Penerimaan (TBP) .

Dokumen ini digunakan sebagai tanda terima atas uang yang disetor oleh wajib pajak/retribusi kepada Bendahara Penerimaan.

3. Surat Tanda Setoran (STS).

Dokumen ini digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah dari Bendahara Penerimaan Kas Daerah di Bank.

4. Nota Kredit Bank.

Bank menggunakan dokumen ini untuk memberitahukan adanya transfer ke rekening kas daerah.

5. Rekap Setoran.

Dokumen ini digunakan untuk melaporkan penerimaan Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu (Jika dibentuk oleh unit kerja).

6. Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH).

Dokumen ini digunakan oleh SPK Pembantu, dimana dokumen ini digunakan untuk merekapitulasi penerimaan dan penyetoran kas berdasarkan Rekap Setoran.

7. Rekening Koran (RK).

Dokumen ini digunakan oleh Bank untuk memberitahukan adanya transfer dari saldo rekening kepada BUD.

2.2.2 Sistem Informasi Pengeluaran Kas

Sistem informasi pengeluaran kas adalah satu proses, cara, perbuatan mengeluarkan alat pertukaran yang diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai satu setoran ke bank. Menurut Mulyadi (2016) sistem akuntansi pengeluaran kas adalah satu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai¹⁴.

Sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui kas kecil dapat diselenggarakan dengan dua cara yaitu sistem saldo berfluktuasi dan kas tetap yang dilakukan dengan prosedur seperti pembentukan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil dan fungsi yang terkait adalah fungsi kas, akuntansi, pemegang dana maupun pemeriksa internal.

Menurut Abdi Manado (2016):

Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas merupakan kesatuan yang melibatkan bagian-bagian, formulir-formulir, catatan-catatan,

¹⁴ Ibid, Hal 425

prosedur-prosedur dan alat-alat yang saling berkaitan satu sama lain yang digunakan perusahaan untuk menangani pengeluaran kas.¹⁵

Menurut pemerintah ada dua jenis pengeluaran yaitu:

- a. **Belanja, ialah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.**
- b. **Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (revisi 2015), beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.¹⁶**

2.2.2.1 Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas

Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi UP, GU, TU dan LS. UP atau uang persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*). Biasanya tiap SKPD akan mendapatkan UP di awal tahun anggaran dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Penerimaan UP ini akan dicatat oleh PPK SKPD dengan menjurnal:

Dr. Kas di bendahara pengeluaran	100.000.000
Cr. RK PPKD	100.000.000

Sedangkan sistem akuntansi PPKD akan mencatat RK SKPD di debit, dan Kas di Kasda pada kredit. Belanja yang dilakukan oleh SKPD menggunakan uang persediaan ini dicatat dalam buku jurnal khusus belanja, dengan mendebit akun belanja yang sesuai dan mengkredit Kas di Bendahara Pengeluaran. Secara

¹⁵Abdi Manado, **Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. HASJRAT ABADI MANADO**, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16 No. 04 Tahun 2016

¹⁶Erlina 'et. al. **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013, 2015, 2017**, Hal. 154

periodik, Bendahara Pengeluaran SKPD akan membuat SPJ Pengeluaran dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP). GU (Ganti Uang), yaitu penggantian uang persediaan (*reimburshment*). Jurnal penerimaan uang GU dan pelaksanaan belanja GU sama dengan penjurnalan pada UP. TU atau tambah uang adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat tercukupi dengan uang persediaan. Jurnal penerimaan uang TU dan pelaksanaan belanja TU sama dengan penjurnalan pada UP dan GU.

2.2.2.2 Fungsi dan Pihak yang terkait.

1. Bank, yaitu sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.
2. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), yaitu pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
3. BUD (Bendahara Umum Daerah), yaitu seorang pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan daerah. Bud umumnya dijabat oleh Kepala Biro/Bagian Keuangan yang berada pada sekretariat Daerah. Kuasa Bud adalah seorang pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

4. Bendahara Pengeluaran, yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

2.2.2.3 Dokumen yang digunakan

1. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), yaitu dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
2. SPP (Surat Permintaan Pembayaran), yaitu dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
3. SPM (Surat Perintah Membayar), yaitu dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
4. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yaitu surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian di dalam penelitian metode yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil data di Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Petisah tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Lokasi penelitian merupakan tempat bagi peneliti untuk melakukan riset penelitian dengan mengambil data sebagai pembanding antara apa yang seharusnya dengan yang terjadi.

Menurut Iwan Satibi (2011:74):

Objek penelitian secara umum akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau sasaran penelitian secara komprehensif, yang meliputi karakteristik wilayah, sejarah perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi lain-lain sesuai dengan pemetaan wilayah penelitian yang dimaksud¹⁷.

¹⁷ Iwan Satibi, **Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan**, Jurnal Riset Akuntansi Vol. 8 No. 2 2016

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerimaan kas berupa penerimaan pajak dan pengeluaran kas berupa gaji pns, kegiatan, dan bantuan sosial.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. data kualitatif merupakan data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek yang dilakukan.

Dalam penelitian ini data kualitatif yang dimaksud ialah struktur organisasi dan juga dokumen yang berisikan transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas serta informasi yang diperoleh peneliti dari pegawai/staff yang bekerja pada bagian kas melalui wawancara yang merupakan sumber data dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Menurut Singh (2002): wawancara adalah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi¹⁸.

3.5 Metode Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu dengan menggambarkan sistem informasi akuntansi yang digunakan pemerintah dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Pertama peneliti akan melakukan Tanya jawab kepada

¹⁸Singh, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*.

narasumber yaitu pegawai pemerintah kota medan mengenai software atau aplikasi apa yang dipergunakan oleh pemerintah kota medan jika terjadi penerimaan kas.

Kemudian peneliti akan melakukan Tanya jawab juga kepada pegawai mengenai dokumen yang dipergunakan pemerintah kota medan seperti Nota Kredit, SP2D, dan SPP yang ada pada pemerintah kota medan. Setelah itu melakukan dokumentasi terhadap Nota Kredit, SP2D, dan SPP yang diperoleh dari pegawai yang bekerja disana. Setelah itu peneliti akan mencoba menyimpulkan bagaimana sistem informasi akuntansi pada pemerintah kota medan.

Penelitian ini ialah Sistem Informasi Akuntansi yang terbagi atas dua bagian yaitu Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Pemerintah Kota Medan. Pada Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas masalah yang sedang terjadi ialah perbedaan pencatatan saldo antara pemerintah kota medan dengan bank. Kesalahan ini timbul diakibatkan oleh perbedaan program yang digunakan oleh pemerintah kota medan dengan bank. Sedangkan pada Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas masalah yang sedang terjadi ialah adanya kesalahan npwp dan jumlah gaji. Untuk menjawab masalah yang timbul pada pemerintah kota medan tersebut peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, kemudian dari informasi yang didapat peneliti akan mencoba melakukan analisa terkait masalah yang terjadi pada pemerintah kota medan dan terakhir menyimpulkan hasil penelitian dan informasi yang telah didapatkan.